BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*), salah satu dari hak cipta tersebut menimbulkan kebijakan ekonomi kreatif serta perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal, adanya kontribusi yang terkait bagi perekonomian negara, maka akan dibahas mengenai pengertian dari hak milik.

Hak milik adalah masalah pokok dalam dunia ekonomi, dari mana ia diperoleh dan bagaimana konsekuensinya yang muncul dari pemilikan tersebut. Sedangkan hak milik atas sesuatu benda adalah satu fenomena yang senantiasa ada, hingga dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan esensial dalam hidup manusia. Umat manusia memandang bahwa memiliki sesuatu merupakan pembawaan naluriyah manusia, itu adalah hak alami, hak kodrati atau hak asasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia, selain itu juga akan

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga, waktu dan dana, manusia menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi.

Karena adanya nilai serta manfaat ekonomi tersebut, pada gilirannya timbul konsep karya-karya cipta intelektual sebagai kekayaan. Dalam ilmu hukum hak terhadap kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia dikategorikan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Dalam rangka pengertian hak milik, apabila kekayaan itu memiliki wujud dan jangkauan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka hak terhadapnya termasuk dalam kelompok hak milik intelektual.

Istilah hak milik intelektual adalah terjemahan dari *intellectual property right* yang merupakan istilah kolektif, dalam arti istilah ini mencakup tiga bidang pokok yaitu ciptaan, penemuan, dan merek.¹ Intellectual property rights atau hak milik intelektual berada dibawah naungan WIPO (*World Intellectual Property Organization*),² yang merupakan sebuah lembaga khusus dari PBB yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman internasional dalam bidang hak atas kekayaan intelektual yang penting bagi masyarakat internasional. Tujuan umum WIPO adalah untuk memelihara dan meningkatkan penghargaan terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia, sehingga mendukung pengembangan perindustrian dan kebudayaan melalui pemberian semangat untuk melakukan

¹Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, Jakarta, Akademik Presindo, 1990, hlm. 1.

²Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra aditya Bakti, 1998, hlm. 69

kegiatan kreatif, pemberian kemudahan untuk alih teknologi dan penyebaran ciptaan.³

Sebagaimana telah diketahui bahwa hak milik intelektual adalah istilah kolektif yang mencakup tiga bidang pokok, yaitu ciptaan, penemuan dan merek⁴. Pemilikan hak milik intelektual bukan pada barangnya melainkan hasil kemampuan intelektualnya, yaitu berupa ide. Menurut WR. Cornish, milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.⁵

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa dan cipta manusia dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia. Karenanya atas hasil kreasi tersebut, didalam masyarakat yang beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai hak tersebut untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti yang seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.⁶

Hukum positif mengenai hak cipta pada hakekatnya melindungi ide-ide, waktu yang dipakai bahkan biaya yang dikorbankan oleh pencipta sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap suatu karya cipta, sehingga pencipta mempunyai hak khusus untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin kepada orang lain yang mempergunakan ciptaannya.

³Ibid

⁴Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual....* . hlm.V.

⁵Muhammad Djumhana,R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti, cet. II 1999, hlm. 20

⁶Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Muh. Radjab (terj.), Jakarta, Bintang Karya Aksara, cet. III, 1982, hlm. 118.

Hak cipta pada prinsipnya merupakan salah satu hak yang dianggap sebagai hak milik atas seseorang, pengaturan hak milik di atur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Hukum positif mengenai hak cipta pada hakekatnya melindungi ide-ide, waktu yang dipakai bahkan biaya yang dikorbankan oleh pencipta sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap suatu karya cipta, sehingga pencipta mempunyai hak khusus untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin kepada orang lain yang mempergunakan ciptaannya.

Hak cipta mempunyai 2 dimensi yaitu hak ekonomi dan hak moral yang secara otomatis melekat pada waktu karya tersebut lahir. Hak ekonomi adalah hak menerima keuntungan ekonomi atas ciptaannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan ada batas waktunya dan hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik HKI tidak dapat dialihkan dan tidak ada batas waktunya berupa hak atas keutuhan karyanya dan hak namanya tercantum sebagai pencipta Hak Atas Intelektual (HKI).

Hak eksklusif (*exclusive rights*), Hak Cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing right*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical right*). Dalam era ekonomi global, pelaksanaan perlindungan hak moral semakin terabaikan.

Upaya yang dilakukan seseorang untuk mengkreasikan dan mencurahkan hasil karya pikirannya, tenaga dan dana serta memiliki manfaat untuk kehidupan manusia mengakibatkan timbulnya suatu kompensasi berupa hak yang dapat dikomersialkan oleh pemilik kekayaan intelektual tersebut dan dapat memberinya suatu keuntungan finansial.

Secara sederhana, *pertama*, bentuk penggunaan komersial dari kekayaan intelektual dapat dilakukan langsung oleh pemilik kekayaan tersebut. Dengandemikian maka pihak pemilik dapat secara langsung memperoleh kompensasi finansial akibat transaksi yang menyangkut penggunaan kekayaan intelektual tersebut. *Kedua*, pemilik dapat menjual atau memperoleh kompensasi finansial dengan membolehkan penggunaan hak atas kekayaan intelektual tersebut kepada pihak lain. *Ketiga*, pemilik hak atas kekayaan tersebut dapat mencegah pihak lain memperoleh dan mempergunakannya⁷

Walaupun Perundang-undangan sudah mengatur mengenai hak cipta namun dengan aturan yang disandarkan kepada aturan TRIP's dan WTO mempunyai kelemahan karena aturan tersebut hanya mengakui unsur penemuan modern yang termasuk ke dalam kategori HKI. Oleh karena itu semua bentuk pengetahuan tradisional baik cerita, legenda, dan pengetahuan lain semuanya meskipun termasuk objek HKI akan tetapi semua orang dapat mencontoh, memakai ataupun meniru produk-produk tanpa merasa perlu membayar sejumlah royalti terhadap seseorang yang dianggap sebagai penciptanya, terkecuali bagi warga Negara asing yang ingin

⁷ H. S. Kartadjoemana, 1997, GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round, Penerbit Universitas Indonesia, hlm 254

mengembangkan diharuskan untuk mendapatkan izin (lisensi) dari Negara asal seni tersebut.

Karya seni merupakan salah satu perwujudan kreasi manusia melalui akal budinya mengkespresikan sesuatu keindahan yang dilihat dan dirasakan dalam hatinya, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk suatu karya nyata, misalnya lagu, puisi, gerakan tubuh (tari) yang indah dan karya cipta yang lainnya. Hasil kreatifitas ini merupakan proses olah budi manusia yang menghasilkan suatu bentuk karya nyata tersebut biasa disebut dengan karya cipta yang didalamnya terdapat hak bagi si pencipta atau pembuatnya, yang sering disebut dan dikenal dengan Hak Cipta.

Seni menghasilkan suatu karya seni dengan melalui proses penciptaan yang disebut juga proses kreatif, yaitu rangkaian kegiatan seorang seniman dalam menciptakan dan melahirkan karya – karya seninya sebagai ungkapan gagasan dan keinginannya. Proses penciptaan ini tidak terjadi dan diturunkan dari ruang kosong. Tapi pada hakikatnya hanyalah usaha memodifikasi (mengubah/menyesuaikan) sesuatu yang telah ada sebelumnya.⁸

Salah satu contoh karya cipta tradisional Wayang dikenal sejak zaman prasejarah yaitu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Masyarakat Indonesia memeluk kepercayaan animisme berupa pemujaan roh nenek moyang yang disebut *hyang* atau *dahyang*, yang diwujudkan dalam bentuk arca atau gambar.

Wayang merupakan seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan wayang telah diakui oleh UNESCO pada

⁸ Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto. *Teori-teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007. hal 7

tanggal 7 November 2003, sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan sangat berharga (*Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity*).

Ada versi wayang yang dimainkan oleh orang dengan memakai kostum, yang dikenal sebagai wayang orang, dan ada pula wayang yang berupa sekumpulan boneka yang dimainkan oleh dalang. Wayang yang dimainkan dalang ini diantaranya berupa wayang kulit dan wayang golek. Cerita yang dikisahkan dalam pagelaran wayang biasanya berasal dari Mahabharata dan Ramayana.

Pertunjukan wayang di setiap negara memiliki teknik dan gayanya sendiri, dengan demikian wayang Indonesia merupakan buatan orang Indonesia asli yang memiliki cerita, gaya dan dalang yang luar biasa, sebagai salah satu contoh masyarakat jelekong dimana di daerah tersebut ada pelaku usaha sebagai pembuat wayang golek, dan pelaku kesenian wayang golek yang dikenal diantaranya Asep Sunandar Sunarya

Karena adanya nilai serta manfaat ekonomi tersebut, pada gilirannya timbul konsep karya-karya cipta intelektual sebagai kekayaan. Dalam ilmu hukum hak terhadap kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia dikategorikan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Dalam rangka pengertian hak milik, apabila kekayaan itu memiliki wujud dan jangkauan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka hak terhadapnya termasuk dalam kelompok hak milik intelektual.

Namun pada kenyataannya perlindungan bagi pengrajin khususnya pembuat wayang golek di Indonesia dan khususnya di wilayah kecamatan Jelekong

Kabupaten Bandung pada saat ini tidak terlindungi secara maksimal, hal ini terlihat dengan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap para pengrajin, apabila para pengrajin tidak dilindungi oleh pemerintah dapat saja hal ini memberi dampak pudarnya bahkan hilangnya pengrajin wayang golek bahkan bisa saja pengrajin wayang golek menjadi punah, hal ini dikarenakan proses pembuatan wayang golek yang terhitung sangat rumit dan memerlukan ilmu yang cukup, namun apabila dibiarkan bisa saja ilmu pembuatan wayang golek yang diwariskan secara turun temurun bisa menjadi hilang.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta idealnya sudah melindungi para pengrajin wayang golek namun pada kenyataannya di lapangan implementasi perlindungan hak cipta masih tidak terbukti, dari sedikit pemaparan di atas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Produsen Dan Pelaku Seni Wayang Golek Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut diatas, dan untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis akan membahas berdasarkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Mekanisme Perlindungan Hukum Terkait Dengan Hak Ekonomi Terhadap Produsen Dan Pelaku Seni Wayang Golek Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

2. Kendala apa yang dihadapi dalam Mekanisme Perlindungan Hukum Terkait Dengan Hak Ekonomi Terhadap Produsen Dan Pelaku Seni Wayang Golek Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
3. Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi atas pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh Produsen Dan Pelaku Seni Wayang Golek Berdasarkan Kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dan Memahami Serta Mengkaji Mekanisme Perlindungan Hukum Terkait Dengan Hak Ekonomi Terhadap Produsen Dan Pelaku Seni Wayang Golek Berdasarkan Kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk Mengetahui Dan Memahami Serta Mengkaji Kendala Apa Yang Dihadapi Dalam Mekanisme Perlindungan Hukum Terkait Dengan Hak Ekonomi Terhadap Produsen Dan Pelaku Seni Wayang Golek Berdasarkan Kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Untuk Mengetahu Dan Memahami Serta Mengkaji Bagaimana Menyelesaikan Permasalahan Yang Terjadi Atas Pelanggaran Terhadap Hak Ekonomi Yang Dimiliki Oleh Produsen Dan Pelaku Seni Wayang

Golek Berdasarkan Kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) pada khususnya terkait dengan Perlindungan Hukum Produsen Dan Pelaku Seni Wayang Golek Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - b. Memberikan sumbangan bagi ilmu hukum dalam rangka pencapaian tujuan hukum yaitu untuk menciptakan suatu bentuk kepastian hukum;
 - c. Memberikan tambahan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan.
2. Kegunaan Praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat:
 - a. Memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat tentang persoalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) pada khususnya mengenai Perlindungan Hukum Produsen Dan Pelaku Seni Wayang Golek Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai masukan bagi para pihak, praktisi hukum maupun pemerintah dalam bidang hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) khususnya terkait dengan Perlindungan Hukum Produsen Dan Pelaku Seni Wayang Golek Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah *rechtsstaat* itu sendiri digunakan dengan istilah yang berbeda antara satu Negara dan Negara lainnya, seperti di Perancis Negara hukum dikenal dengan *e'tatde droit*, sedangkan di Jerma dan Belanda menggunakan istilah yang sama yaitu *rechtsstaat*. Di Negara Inggris Negara hukum dikenal dengan istilah *the rule of law*.Kepustakaan hukum Indonesia disamping mengenal istilah *rechtsstaat* juga mengenal *rule of law* untuk memaknai Negara hukum. Mohammad Yamin menggunakan istilah Negara hukum dengan *rechtsstaat* atau *government of law*⁹

Negara hukum merupakan sebuah konsep dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga menurut Mochtar Kusumaatmadja makna Negara hukum adalah kekuasaan harus tunduk pada hukum dan semua orang sama di depan hukum, dalam Negara hukum berarti semua alat perlengkapan Negara berdasarkan hukum dan hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku,

⁹Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung, PT. Alumni, 2002, hlm. 12

bahkan pembagian kekuasaan tersebut bertujuan untuk memperlemah kekuasaan elit-elit politik¹⁰

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa Tujuan Hukum diciptakan untuk meluruskan kehidupan manusia dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat pada suatu negara yang merdeka dan berdaulat¹¹ sebagai landasan negara hukum di Indonesia adalah Pancasila menurut Eddy Damian¹² menyatakan bahwa:

“Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia mengaturnya dalam sila Kelima yaitu *sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Pancasila sila kelima yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia pendiriannya dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Keberadaan dan peranan orang-orang secara individual tidaklah dilenyapkan atau diabaikan sama sekali, terbukti dari diberikannya penghormatan kepada hak-hak orang lain dan penghargaan oleh masyarakat kepada hasil karya seseorang serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban”.

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi oleh undang-undang, kekayaan itu tidak hanya semata-mata untuk seni, sastra dan budaya tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dibidang perdagangan yang melibatkan penciptanya. Dengan demikian kekayaan seni, sastra dan budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi pencipta, tetapi bagi bangsa dan negara.

¹⁰Ibid

¹¹Ibid

¹² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung, 2002, hlm. 29-30

Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1 yang mengatakan bahwa:

“Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Manusia yang dapat menghasilkan Karya Cipta memang memberikan kepuasan batindi samping karya cipta tersebut memiliki arti ekonomi. Dalam takaran ekonomi kelahiran suatu karya telah melibatkan penghargaan pada tenaga, waktu, dan biaya. Jika faktor-faktor tersebut dikomersilkan ke dalam angka-angka, maka semua itu akan menunjukkan nilai karya tersebut, nilai ekonomi pada suatu karya cipta.

Hak Cipta tersebut adalah hak khusus yang mempunyai arti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

Sri Rejeki Hartono mengungkapkan bahwa¹²:

“ Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi”.

Widyopramono mengungkapkan bahwa⁸:

”Hak Cipta lebih banyak dikategorikan sebagai hak-hak ekonomi disamping hak-hak moral. Hak-hak ekonomi adalah hak-hak yang memiliki nilai keuangan yang dapat dialihkan dan dieksploitasikan secara ekonomi karena mempunyai nilai-nilai ekonomi yang sangat

¹² Sri Rejeki Hartono dalam bukunya Pipin Syarifin dan Deden Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quaraisy, Bandung, 2004, hlm. 4

⁸ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaian*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 4

menguntungkan, maka pembajakan Hak Cipta seseorang tumbuh subur di Indonesia”.

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat telah mendorong kemungkinan adanya penggandaan atau pembajakan terhadap Hak Cipta, sehingga tumbuh konsepsi hukum mengenai kebutuhan untuk melindunginya. Pengembangan konsepsi ini, mendorong timbulnya sikap dan budaya untuk menghormati dan menghargai hasil karya orang lain.

Bentuk perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa :

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari isi Pasal tersebut di atas hak cipta dilindungi setelah ciptaannya selesai atau sudah berbentuk nyata, perlindungannya bukan sesudah pendaftaran. maka Undang-Undang di atas menganut sistem deklaratif yaitu bahwa pendaftaran terhadap hak cipta bukan suatu keharusan.

Pencipta suatu karya atau ciptaan pada awalnya adalah pemegang hak cipta atas karya tersebut. Pengalihan kepemilikan bisa dilakukan melalui proses penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Apabila suatu ciptaan dibuat oleh karyawan pemerintah dan karya tersebut

menjadi bagian sehari-hari tugas karyawan tersebut, maka pemegang hak cipta biasanya adalah pemerintah. Namun baik sektor pemerintah maupun disektor swasta, hal ini sangat ditentukan oleh perjanjian.

Apabila pencipta suatu ciptaan adalah orang tidak dikenal dan hasil ciptaan tersebut belum dipublikasikan, maka menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, Negara.

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab XIV Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI.

Ikut sertanya Indonesia menandatangani perjanjian *TRIPS Agreement*, itu berarti Indonesia wajib mentaati kewajiban-kewajiban dalam perjanjian tersebut. Salah satu kewajiban yang dipersyaratkan adalah seluruh negara anggota termasuk

Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat menjadi HKI.

Aturan dan substansi hukum HKI di Indonesia dibuat dan didasarkan kepada aturan *TRIP's* dan *WTO*. Hal ini dikarenakan Indonesia telah menjadi negara peserta anggota *WIPO* (*World Intellectual Property Organization*) dan *WTO*.

Perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade / GATT*) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (*WTO*) telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan HKI yang meliputi :

1. Hak Cipta dan hak lain-lain (*copyrights and related right*);
2. Merek (*Trademark, service marks, and names*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial design*)
5. Paten (*Patens*), termasuk varietas tanaman ;
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout design (topographies) of integrated circuits*);
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of undisclosed information*);
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of anti competitive practices in contractual licenses*);¹³

¹³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana HAKI*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 4

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia¹⁴

Istilah milik intelektual adalah terjemahan dari *intellectual property right* yang merupakan istilah kolektif, dalam arti istilah ini mencakup tiga bidang pokok yaitu ciptaan, penemuan, dan merek.¹⁵ *Intellectual property rights* atau hak milik intelektual berada dibawah naungan WIPO (*World Intellectual Property Organization*),¹⁶ yang merupakan sebuah lembaga khusus dari PBB yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman internasional dalam bidang hak atas kekayaan intelektual yang penting bagi masyarakat internasional. Tujuan umum WIPO adalah untuk memelihara dan meningkatkan penghargaan terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia.¹⁷

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, Hak ekonomi lahir sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada pencipta atas hasil ciptaannya yang dapat dipergunakan oleh orang lain. Bentuk dari hak ekonomi adalah adanya hak dari pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi ini dapat dialihkan

¹⁴Locke, *Two Treatises of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hal. 285 dalam *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi* hal 7. Syafrinaldi. 2010. UIR Press.

¹⁵Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, Jakarta, Akademik Presindo, 1990, hlm. 1.

¹⁶Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra aditya Bakti, 1998, hlm. 69

¹⁷*Ibid.*

kepada orang atau badan hukum, sehingga orang atau badan hukum itu yang berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan untuk digunakan sendiri atau dikomersilkan dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Dia juga berhak untuk memberikan izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak satu ciptaan.

Hukum positif mengenai hak cipta pada hakekatnya melindungi ide-ide, waktu yang dipakai bahkan biaya yang dikorbankan oleh pencipta sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap suatu karya cipta, sehingga pencipta mempunyai hak khusus untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin kepada orang lain yang mempergunakan ciptaannya.

Hasil kreasi tersebut, didalam masyarakat yang beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai hak tersebut untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti yang seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.¹⁸

Salah satu cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peran pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak cipta berdasarkan pada prinsip:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berbentuk materi ataupun bukan materi, seperti ada rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil

¹⁸Rescoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Muh. Radjab (terj.), Jakarta, Bintang Karya Aksara, cet. III, 1982, hlm. 118.

karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut hak.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak Cipta ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan yang kreatif dari suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai macam bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah wajar bahwa kepemilikan itu karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan satu hal itu keharusan untuk menunjang kehidupannya dalam masyarakat. Dengan demikian hak cipta merupakan suatu bentuk kekayaan bagi penciptanya.

3. Prinsip Kebudayaan

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu juga muncul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lainnya, dengan konsepsi ini maka pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf hidup, peradaban dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Menurut Robert M Sherwood, perlindungan HKI didasarkan pada teori sebagai berikut:¹⁹

1. Teori Reward, mengajarkan bahwa pencipta yang menghasilkan suatu karya yang dilindungi, diberikan penghargaan atas jerih payahnya.
2. Teori Recovery, mengajarkan bahwa pencipta setelah mengeluarkan biaya, waktu dan pikirannya memperoleh kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya.
3. Teori incentive, mengajarkan bahwa dalam menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas, diperlukan suatu insentif bagi pencipta tersebut.

Menurut Eddy Damian ada tiga macam konsepsi suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi manusia, yaitu:

1. Konsepsi Kekayaan, berupa hasil kekayaan intelektual yang mempunyai nilai tertentu berdasarkan sifat dan kegunaannya.
2. Konsepsi Hak, berupa hak kebendaan yang tidak berwujud yang dimiliki oleh subjek hukum yang berhak atas kekayaan intelektual tersebut.
3. Konsepsi perlindungan hukum atas hak Kekayaan Intelektual²⁰.

¹⁹ Robert M Sherwood, dalam Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Chandra Pratama, Jakarta, 1999, hlm. 29.

HKI dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mekanisme hibah, wasiat, waris, peraturan perundang-undangan dan perjanjian apabila ada persengketaan dalam HKI dapat diselesaikan melalui mekanisme Litigasi dengan melalui persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tidak terduga, Non Litigasi adalah menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara *deskriptif analitis*¹⁰ berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri khususnya mengenai perlindungan hukum hak ekonomi produsen dan

²⁰ Eddy Damian, *Hukum hak Cipta Menurut Beberapa konvensi internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitnya*. PT Alumni Bandung 2002, hlm. 18

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13

pelaku seni wayang golek dihubungkan dengan undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta.

2. Metode Pendekatan

Menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder.¹¹

Roni Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa:

“ Metode Yuridis Normatif adalah pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis. “

Penelitian dilakukan dengan cara menguji dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum produsen dan pelaku seni wayang golek dibubungkan dengan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian yang dibagi dalam 2 (dua), yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap ini menguji data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, penelitian kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer berupa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kompilasi Hukum Islam, maupun bahan hukum sekunder seperti buku maupun Koran.

b. Studi Penelitian Lapangan

¹¹*Ibid*, hlm 14.

Studi penelitian lapangan tergolong kedalam data primer, terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) melalui penelitian lapangan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²¹

3. Tahap Penelitian

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan per Undang-Undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainnya yang berkaitan dengan dengan Perlindungan Hukum Produsen Dan Pelaku Seni Wayang Golek Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

- a. *Library Research* (Penelitian kepustakaan) Adalah penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik yang ada dalam literatur maupun perUndang-Undangan yang berkaitan dengan

²¹*Ibid*, hlm.116

masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) Adalah suatu cara untuk memperoleh data atau bahan-bahan secara langsung dengan menggunakan penelitian di lapangan, dalam hal ini mengadakan wawancara secara bebas terarah yang berkaitan dengan permasalahan Perlindungan Hukum Produsen Dan Pelaku Seni Wayang Golek Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Kepustakaan Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dengan studi dokumen atau bahan pustaka.
- b. Lapangan ini menggunakan alat pengumpul data dengan studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data baik tertulis ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.²² kualitatif, karena seluruh data yang

²²*Ibid* Hlm 17

diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik.

7. Lokasi Penelitian

a Penelitian Kepustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAS di Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD di Jalan Dipati Ukur Bandung.
- c. Perpustakaan Daerah di Jalan Soekarno Hatta Bandung.

b Penelitian Lapangan

- a. Pengrajin Wayang Golek di Wilayah Jelesong Kab. Bandung.